**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Konsep Kesejahteraan Sosial**
2. **Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Permasalahan sosial yang terjadi di dunia khususnya Indonesia telah berdampak negatif bagi masyarakatnya, hal ini tentu akan berakibat fatal dan akan mengganggu suatu proses keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Untuk dapat mengurangi dan mencegah hal tersebut, tentunya harus menggunakan ilmu yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Salah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan masyarakat tersebut yaitu ilmu Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, masalah-masalah sosial, dan program-program pelayanan sosial yang diharapkan dapat digunakan untuk mengembalikan keberfungsian seseorang baik itu individu atau kelompok masyarakat. Seperti halnya sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, studi pembangunan, dan pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebab dan strategi penanggulangannya.

Definisi mengenai ilmu Kesejahteraan Sosial lainnya yaitu menurut Suharto (2010:1) sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. sosial dan pelayanan sosial.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan suatu bidang atau institusi yang melibatkan aktivitas dan diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengatasi dan memberikan kontribusi atau berperan terhadap pemecahan masalah sosial yang ada, lalu kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok serta masyarakat.

Defiisi lain mengenai kesejahteraan sosial yaitu menurut Fahrudin (2012 : 10) yang merujuk kepada Undang-undang No.11 tahun 2009 sebagai berikut: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Kesejahteraan Sosial itu sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat banyak yang bersangkutan dengan kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan tentu juga kebutuhan sosial sosial warga negaranya agar dapat memaksimalkan hidupnya dengan semaksimal mungkin, serta melaksanakan suatu fungsi sosialnya dengan baik dan benar sehingga setiap warga atau masyarakat dapat mengembangkan dirinya sebaik mungkin.

Definisi Kesejahteraan Sosial yang lainnya dan tidak kalah baiknya yaitu menurut Huraerah (2003:153), yang berpendapat bahwa: “Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa kesejahteraan sosial membantu orang-orang yang bermasalah dengan kegiatan-kegiatan yang terpadu dan sistematis untuk meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat dan juga untuk mengembalikan keberfungsian masyarakat serta dapat memenuhi pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga akan mendorong masyarakat menuju kearah kualitas hidup yang lebih baik dan mampu untuk mencapai fungsi sosialnya, apabila pemenuhan kebutuhan tersebut semuanya sudah tercukupi.

1. **Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yaitu kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu kesejahteraan Sosial memiliki tujuannya tersendiri yaitu mengembalikan keberfungsian seseorang atau individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Tujuan Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin (2012:10), yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

 Maksud dari pernyataan di atas tersebut yaitu tercukupinya kebutuhan-kebutuhan seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan individu maupun kelompok di lingkungannya. Terdapat tiga tujuan utama dari sistem Kesejahteraan Sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10), yaitu :

* 1. pemeliharaan system
1. pengawasan sistem dan
2. perubahan sistem

Penjelasan yang pertama, yakni pemeliharaan sistem adalah pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat seperti definisi makna dan tujuan hidup, motivasi, dan pelaksanaan norma peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Penjelasan yang kedua, yakni pengawasan sistem adalah melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Penjelasan yang ketiga, yakni perubahan sistem adalah mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

1. **Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan Sosial ini selain memiliki pengertian serta tujuan yang ada, juga memiliki suatu fungsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan perubahan sosial yang ada dan saat ini terjadi. fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte dalam Fahrudin (2012:12), antara lain:

Fungsi Pencegahan (*Preventif*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah – masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan (*Curatif*)

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain. Penjelasan dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial.

Fungsi penunjang menjadi salah satu kegiatan untuk membantu mencapai tujuan di bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lainnya.

Fungsi kesejahteraan sosial di atas akan dapat di terapkan dalam praktik pekerja sosial profesional serta dalam pemecahan masalah masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pelayanan atau masih menutup diri tentang betapa pentingnya untuk ikut berpartisipasi dalam kb terlebih dalam pelayanan kb keliling, sehingga nantinya akan dapat memecahkan masalah sosial yang ada.

1. **Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial**

Secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk dalam bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit menurut Fink (1974), Friedlander (1980), Mendoza (1981), dan Zastrow (1996) dalam Isbandi (2005:128), antara lain meliputi:

* 1. Bidang yang terkait dengan Sistem Penyampaian Layanan (*Service Delivery System*).
	2. Bidang yang terkait dengan Layanan Sosial terhadap Keluarga.
	3. Bidang yang terkait dengan Pelayanan terhadap Anak-Anak dan Generasi Muda.
	4. Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia (Lansia).
	5. Bidang yang terkait dengan Kelompok Khusus.
	6. Bidang yang terkait dengan Jaminan Sosial (Bantuan Sosial dan Asuransi Sosial)
	7. Bidang yang terkait dengan Pengentasan Kemiskinan.
	8. Bidang yang terkait dengan Perumahan dan Lingkungan Sosial.
	9. Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Masyarakat.
	10. Bidang yang terkait dengan Perawatan Medik.
	11. Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Jiwa.
	12. Bidang yang terkait dengan Lembaga Koreksional
	13. Bidang yang terkait dengan Lembaga Pendidikan.
	14. Bidang yang terkait dengan Area Lain.
1. **Tinjauan tentang Persepsi**
	1. **Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan proses memberi makna terhadap stimulus yang berupa informasi mengenai lingkungannya yang diterima oleh panca indranya yang di tentukan juga oleh faktor personal dan situasional. Faktor personal dapat dilihat dari faktor keberfungsian dari panca indra, sedangkan situasional dapat dilihat dari keadaan pada saat individu tersebut menerima rangsang. Pengertian persepsi dalam buku psikologi komunikasi menurut Rahmat (2012:50), sebagai berikut : Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi *(sensory stimuli)*.

Pengertian persepsi tersebut menggambarkan bahwa persepsi merupakan suatu pengalaman objek, peristiwa atau hubungan yang di dapat atau diperoleh dengan menyimpulkan imformasi atau dari suatu penafsiran pesan yang ada sehingga menjadikannya sebagai suatu pengalaman yang dapat di gambarkan. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat pandangan lain tentang persepsi menurut Desmita (2009:118), tentang persepsi yaitu : Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh sistem alat indera manusia.

Dari definisi atau pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Persepsi merupakan proses penggunaan pengetahuan yang ada dan telah dimiliki untuk dapat memperoleh serta menginterpretasikn rangsangan atau stimulus yan telah diterima oleh suatu sistem alat indera manusia. Hal ini berkaitan dengan Pengertian persepsi menurut Sarwono, (2012:86) adalah sebagai berikut :

Persepsi adalah seseorang yang menerima stimulus dari luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuannya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.

Dari definisi di atas menyatakan bahwa persepsi merupakan seseoang yang menerima stimulus dari luar yang kemudian ditangkap oleh organ-organ atau indera bantuannya yang kemudian masuk ke dalam otak yang di dalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud kedalam bentuk sebuah pemahaman. Bebarapa definisi di atas tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting yang di pengaruhi stimulus yang memungkinkan untuk mengetahui serta memahami dunia sekelilingnya. Tanpa persepsi, manusia mustahil dapat memaknai berbagai hal seperti informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pandangan manusia.

* 1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Persepsi yang dimiliki setiap individu akan berbeda karena stimulus yang diterima oleh individu juga berbeda, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi persepsi individu. Dalam buku psikologi umum terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi persepsi individu, yaitu sebagai berikut :

* + 1. **Faktor Internal**

Faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang dapat juga mempengaruhi persepsi yang akan muncul pada seseorang, faktor internal mencakup pada beberapa hal sebagai berikut :

Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indra, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indra untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.

Minat

Persepsi terhadap suatu objek bervariasi, tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagi minat.

Kebutuhan yang terarah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

Suasana hati

Keadaan emosi mempengaruhi prilaku seseorang, *mood* ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

* + 1. **Faktor Eksternal**

Karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlihat didalamnya merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, antara lain :

Hubungan dengan obyek

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan dengan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk diperhatikan pada gilirannya membentuk persepsi.

Warna dari obyek-obyek

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be percived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

Keunikan dan kekontrasan stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

Intensitas dan kekuatan dari stimulus

Stimulus dari suatu obyek akan memberi makna lebih banyak pada obyek yang sering diperhatikan, dibandingkan dengan obyek yang hanya dilihat. Ketuatan dari stimulus merupakan data dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

*Motion* atau gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

1. **Tinjauan Tentang Pelyanan Sosial**
	1. **Pengertian Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial merupakan suatu pelayanan atau kebijakan dalam upaya untuk pencegahan serta pembangunan dan pengembangan kesejahteraan sosial, selain itu pelayanan sosial juga sebagai usaha untuk mengembalikan keberfungsian sosial masyarakat yang mencakup pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelayanan sosial. Definisi pelayanan sosial menurut Romanyshyn (1971) yang dikutip oleh Fahrudin (2012:51) mendefinisikan Pelayanan Sosial yaitu :

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluarga-keluarga melalui 1. Sumber-sumber sosial pendukung, dan 2. Proses-proses meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stres dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Berdasarkan definisi di atas maka pelayanan sosial menyatakan bahwa suatu usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan serta menigkatkan keberfungsian sosial indiividu dan keluarga agar kembali seperti sediakala dengan melalui sumber sosial pendukung yang ada, kemudian meningkatkan kemampuan individu dan keluarga untuk dapat menyelesaikan masalah dan tuntutan kehidupan sosial yang normal. Adapun kemudian pengertian penelitian sosial yang lain, seperti yang dikemukakan oleh Suharto (2009 : 154) adalah sebagai berikut:

Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari definisi di atas yang menyatakan bahwa pelayanan sosial merupakan suatu aksi dan juga tindakan untuk dapat mengatasi masalah-masalah sosial. Pelayanan sosial juga dapat diartikan lain yaitu sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk dapat membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

* 1. **Bidang-Bidang Pelayanan Sosial**

Bidang-bidang pelayanan sosial tidak hanya mencangkup masalah dasar pada umumnya saja, akan tetapi juga masalah yang lebih luas mencangkup pelayanan klinis sampai penataan sistem masyarakat. Pelayanan sosial sebagai suatu gambaran suatu aktifitas pekerja sosial dalam praktik nya. Bidang-bidang pelayanan sosial menurut Merton & Nisbet (1976) dalam Wibhawa, (2010: 76) adalah sebagai berikut:

1. Perilaku Menyimpang (*Deviant behavior*)
	* + 1. Tindakan kejahatan dan kenakalan remaja (*Crime and Juvenile Deliquency*).
			2. Gangguan-gangguan mental (*Mental Disorders*)
			3. Penggunaan obat-obatan terlarang (*drugs abuse*)
			4. Kecanduan alcohol dan pemabukan (*Alcoholism and Dringking*)
			5. Perilaku seksual (*Sexual Behavior*)
2. Disorganisasi Sosial (*Social Disorganization*)
3. Krisis kependudukan dunia (*The Worlds Populations Crisis*)
4. Kesehatan dan ketidaksetaraan (*Equality and Linequality*)
5. Lansia (*Age and Aging*)
6. Peranan-peranan seksual (*Sex Roles*)
7. Ras dan hubungan antar kelompok di dalam masyarakat (*Race and Intergroup Relation*)
8. Disorganisasi komunitas dan masalah-masalah perkotaan (*Community Disorganization and Urban Probrems*)
9. Dunia Pekerjaan (*The World of Work*)
10. Kemiskinan dan Proletariat (*Provement and Proletariat*)
11. Kekerasan Kolektif (*Collective Violence*)
12. **Tinjauan tentang Partisipasi**
	1. **Pengertian Partisipasi**

Partisipasi secara umum digambarkan sebagai suatu hubungan dari individu ataupun masyarakat terhadap suatu kegiatan, baik itu dilakukan sebelum kegiatan dalam bentuk pemikiran dan perencanaan, lalu di dalam pelaksanaannya ada tenaga, biaya dan lain-lain. Menurut Keith Davis dikutip oleh Huraerah (2009 : 95) adalah sebagai berikut:Partisipasi di definisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.

Berdasarkan pernyataan di atas yang menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam suatu situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok yang artinya orang-orang ini secara sadar mengikuti apapun rangkaian yang ada dan nantinya orang-orang ini akan bertanggung jawab, patuh dan tunduk terhadap apa yang ada di dalamnya

* 1. **Pengelompokan Partisipasi Masyarakat**

Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan praktik pembangunan masyarakat yang demokratis, sebagaimana dikemukakakn Geventa dan Velderama dalam Suhirman (2003), yaitu:

Partisipasi politik : representasi dalam demokrasi. Tujuannya untuk mempengruhi dan mendudukan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan daripada melibatkan langsung masyarakat dalam proses-proses pemerintahan.

Partisipasi sosial: keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai ‘beneficiary’ pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi program. Dengan demikian, partisipasi diletakan di luar lembaga formal pemerintahan seperti forum warga.

Partisipasi warga: pengambilan keputusan langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima (objek), tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Sementara menurut Najib (2005) dalam Hueaerah (2009 : 100) jika dilihat dari penggunaannya partisipasi dapat dikelompokan menjadi:

Partisipasi sebagai alat

Melalui partisipasi pemerintah diharapkan mampu menyusun berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga, serta mampu mendorong pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, bertanggungjawab, dan efisien.

Partisipasi sebagai tujuan

Setiap warga Negara memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan yang diharapkan berdampak pada kehidupannya. Partisipasi warga merupakan salah satuaspek dari kehidupan bernegara, di mana warga memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyusunan serta pengambilan keputusan berbagai kebijakan.

Pengertian yang beragam terjadi karena pemahaman terhadap konsep partisipasi itu berbeda-beda. Dari dua konsep partisipasi tersebut, sebetulnya memiliki satu kesamaan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat (berpartisipasi) dalam setiap kegiatan yang mempengaruhi hidupnya, baik melalui lembagaformal maupun lembaga non-formal.

**Tingkatan partisipasi masyarakat**

Karena konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki makna yang luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, bahkan apapun yang disebut “partisipasi”, makan untuk memudahkan memaknainya dapat digunakan tingkatan partisipasi. Menurut Asia Development Bank (ADB) seperti dikutip Soegijoko (2005) dalam Huraerah (2009 : 100), tingkatan partisipasi (dari yang terendah sampai tertinggi) sebagai berikut:

1. Berbagai informasi bersama (sosialisasi**)**

Pemerintah hanya menyebarkluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut.

1. Konsultasi/ mendapatkan ympan balik

 Pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan.

1. Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama

 Masyarakat bukan sebagaipenggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil/keputusan.

1. Pemberdayaan /kendali

Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggnakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama.

Hoofsteede seperti dikutip Khairuddin (1992:124) dalam Huraerah (2009:101) membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Partisipasi inisiasi (inisiation participation) adalah partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi legitimasi (legitimation participation) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi (execution participation) adalah partisipasi pada tingkatan pelaksanaan.

**Bentuk Partisipasi masyarakat**

Bentuk partisipasi yang dimaksud adalah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang berpartisipasi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, pendapat Hamijoyo dan Iskandar, yang dikutip Pasaribu dan Simanjuntak (1986:349) dalam Huraerah (2009 : 102) memperinci jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

* 1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat.
	2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
	3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang alam berbagi kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan seagainya.
	4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
	5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyam-bungan, mulang sambung.

Sedangkan menurut Sulaiman (1985 : 23) dalam Huraerah (2009 : 103) membagi bentuk-bentuk partisipasi social kedalam lima macam yaitu:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secaara fisik dan tatap muka
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanys bersifat sementara dan sebagai umpan
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
5. Partisipasi refresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandate kepada wakil-akil yang duduk dalam organisasi atau panitia.
6. **Motif partisipasi masyarakat**

Seseorang melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu karena ada motif yang menggerakannya, begitu juga dengan hal ini apabila ketika seseorang, kelompok atau kesatuan masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan karena dilandasi oleh motif-motif yang dalam hal ini yaitu berpartisipasi dalam pelayanan kb keliling. Menurut Billah seperti dikutip Taher (1987 : 146-149) dalam Huraerah (2009 : 105) yaitu:

1. Motif psikologi

Kepuasan pribadi, pencapaian prestasi, atau rasa telah mencapai sesuatu (achievement) dapat merupakan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan kegiatan, termasuk juga untuk berpartisipasi meskipun kegiatan atau partisipasinya itu tidak akan menghasilkan keuntungan (baik berupa uang atau materi). Oleh karena itu, usaha meningkatkan partisipasi berarti pula usaha memberikan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, yaitu kesempatan untuk mengekspreikan dirinya dan menyatakan aspirasinya serta keleluasaan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Persoalannya adalah bagaimana mengatur mekanisme agar usaha mencapai kepuasan itu tidak merugikan anggota lain.

1. Motif sosial

Ada dua sisi motif social, yakni untuk memperoleh status social da nada untuk menghindarkan dari terkena pengendalian social (social control). Orang akan dengan suka hati berpartisipasi di dalam suatu kegiatan (pembangunan) manakala keikutsertaannya itu akan membawa dampak meningkatnyastatus sosialnya.

1. Motif keagamaan

Berbeda dengan motif prikologi yang didasarkan pada pencapaian prestasi dan motif sosial yang berlandaskan status social dan pengendalian sosial, motif keagamaan didasarkan pada kepercayaan kepada kekuatan yang ada di luar manusia Tuhan, sesuatu yang gaib, supranatural). Agama sebagai ideologi social yang mempunyai berbagai macam fungsi bagi pemeluknya, yaitu fungsi-fungsi: *inspiratif, normatif, identifikatif, dan operatif/motifatif.* Melalui aktualisasi fungsi-fungsi itu agama dapat meningkatkan peranannya di dalam proses pembangunan, dan lebih dai itu agama dapat meningkatkan peran para pemeluknya dalam proses pembangunan. Persoalannya adalah bagaimana menemukan idiom dan lambing-lambang yang dapat mengintegrasikan agama dengan proses pembangunan.

1. Motif ekonomi

Laba (profit) adalah motif ekonomi yang dapat dan bahkan seringkali efektif mendorong orang mengambil keputusan untuk ikut berparisipasi di dalam kegiatan (pembangunan). Pengambilan keputusan (yang bersifat ekonomis) dapat mengambil dua bentuk strategi, yaitu: maximum profit dan minimum cost. Dengan menggunakan tata nalar ekonomi ini orang akan memutuskan berpartisipasi (dalam suatu kegiatan) manakala kegiatan-kegiatan itu dapat menghasilkan manfaat/keuntungan bagi dirinya atau bagi perusahaan/kelompoknya, atau setidakny ia akan ikut berpartisipasi jika tidak akan memperoleh kerugian atau paling tidak kerugian yang diperoloh dari partisipasinya lebih kecil daripada kerugian yang dapat diderita karena tidak ikut berpartisipasi.

1. Motif politik

Dasar utama politik ini adalah kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi seseorang atau golongan akan ditentukan oleh besr-kecilnya kekuasaan yang dapat diperoleh dari partisipasinya didalam berbagai kegitan (pembangunan). Makin besar kekuasaan yang mungkin diperoleh dari keterlibatannya didalam kegiatan (pembangunan), maka makin kuat pula kemungkinan untuk ikut berpartisipasi.

1. **Peranan Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dan memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. Dalam hal ini masyarakat sendirilah yang akan memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasikan program-proram kesehatan mereka. Institusi kesehatan hanya sekedar memotivasi, membimbing seta meberikan fasilitas yang disini berarti pelayanan kb keliling.

Di dalam partisipasi, setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas dana dan finansial saja, tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4 M yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang/material) dan *mind* (ide atau gagasan).

1. **Dasar-dasar Filosofi Partisipasi Masyarakat**

Dalam hubungannya dengan fasilitas dan tenaga kesehatan, partisipasi masyarakat dapat diarahkan untuk mencukupi kelangkaan sumber daya tersebut. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dapat menciptakan fasilitas dan tenaga kesehatan.pelayanan kesehatan atau program kesehatan yang diciptakan dengan adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada idealisme:

1. Community feld need

Apabila pelayanan atau programitu diciptakan oleh masyarakat sendiri, ini berarti bahwa masyarakat itu memerlukan pelayanan tersebut. Sehingga adanya pelayanan kesehatan bukan karena diturunkan dari atas yang belum dirasakan perlunya, tetapi tumbuh dari bawah yang diperlukan masyarakat dan untuk masyarakat.

1. Organisasi pelayanan atau program kesehatan masyarakat yang berdasarkan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat. Hal ii berarti bahwa fasilitas kesehatan itu timbul dari masyarakat sendiri.
2. Pelayanan kesehatan tersebut akan diikuti oleh masyarakat dibawah bimbingan petugas kesehatan setempat.

Dari uraian tersebut dapat disimpilkan bahwa filosofi partisipasi masyarakat dalam pelayanan atau program kesehatan masyarakat adalah terciptanya suatu pelayanan untuk masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat.

1. **Metode Partisipasi Masyarakat**

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengajak atau menumbuhkan partisipasi masyarakat. Pada pokoknya ada dua cara yakni:

1. Partisipasi dengan cara paksaan (enforcement participation)

Artinya memaksa masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam suatu program, baik melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan maupun dengan perintah lisan saja. Cara ini akan lebih cepat hasinya, dan mudah. Tetapi masyarakat akan takut, merasa dipaksa, dan kaget karena dasarnya bukan kesadaran (awarnees), tetapi ketakutan. Akibatnya masyarakat tidak akan mempunyai rasa memiliki terhadap program.

1. Partisipasi dengan persuasi dan edukasi

Yakni suatu partisipasi yang disadari pada kesadaran.sukar ditumbuhkan, dan akan memakan waktu yang lama. Tetapi bila tercapai hasilnya ini akan menpunyai rasa memiliki, dan rasa memelihara. Partisipasi ini dimulai dengan penerangan, penyuluhan, pendidikan dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. **Nilai-nilai Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah suatu pendekatan atau jalan yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah khususnya berhubungan dengan kesehatan di Negara-negara yang sedang berkembang, karena hal-hal berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan cara yang paling murah. Karena dengan ikut berpartisipasinya masyarakat dalam program-program kesehatan, itu berarti diperolehnya sumber daya dan dana dengan mudah untuk melengkapi falisitas kesehatan itu sendiri.
2. Bila partisipasi itu berhasil, bukan hanya salah satu bidang saja yang dapat dipecahkan, tetapi dapat menghimpun dana dan daya untuk memecahkan masalah di bidang lain.
3. Partisipasi masyarakat akan membuat semua orang untuk belajar bertanggung jawab yang dalam hal ini dari segi kesehatannya.
4. Partisipasi masyarakat di dalam pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari bawah dengan stimulasi dan bimbingan dari atas, bukan sesuatu yang dipaksakan. Ini adalah suatu pertumbuhan yang alamiah bukan pertumbuhan yang semu.
5. **Elemen-elemen Partisipasi Masyarakat**

Elemen-elemen partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Motivasi

Persyaratan utama untuk masyarakat berpartisipasi adalah motivasi. Tanpa motivasi masyarakat sulit untuk berpartisipasi di segala program. Timbulnya motivasi harus dari masyarakat itu sendiri dan pihak luar hana men”stimulasi” saja. Untuk itu pendidikan atau promosi kesehatan sangat diperlukan dalam rangka merangsang tumbuhny motivasi.

1. Komunikasi

Suatu komunikasi yang baik adalah yang dapat menyampaikan pesan, ide dan informasi kepada masyarakat. Media massa seperti tv, radio, poster, dan sebagainya sebagian adalah sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang akhirnya dapat menimbulkan partisipasi.

1. Kooperasi

Kerjasama dengan instansi-instansi diluar kesehatan masyarakat dan instansi kesehatan sendiri adalah mutlak diperlukan. Adanya team work diantara keduanya akan dapat menumbuhkan partisipasi.

1. **Tinjauan tentang Kebijakan Sosial**
	1. **Pengertian Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah untuk dapat melayani keperluan ataupun kepentingan masyarakat. Dalam membuat suatu kebijakan sosial tentunya pemerintah tidak langsung dapat membuat suatu kebijakan dan diresmikan lalu dijalankan di lapangan, melainkan dalam membuat suatu kebijakan sosial yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang diinginkan kepada masyarakat, suatu kebijakan sosial yang dibuat tentulah harus dengan perhitungan yang matang, dan telah terencana sesiap mungkin baik konsep-konsepnya maupun hal-hal lainnya.

Menurut Bessant, Watts, Dalton, dan Smith (2006; 4) dalam Suharto (2013; 10) kebijakan sosial yaitu: apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Berdasarkan definisi diatas kebijakan sosial merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk dapat memberikan suatu pelayanan bagi masyarakat serta memberikan solusi untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan sosial yang ada dan dibuat oleh pemerintah, maka permasalahan sosial yang ada akan dapat teratasi.

Definisi yang tidak jauh berbeda mengenai kebijakan sosial yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dengan menyediakan pelayanan terhadap masyarakat juga dikemukakan oleh Marshall dalam Huda (2009: 85) yang menyatakan bahwa kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang langsung terhadap kesejahteraan warga Negara melalui penyediaan pelayanan sosial dan bantuan keuangan.

Berdasarkan definisi tersebut kebijakan sosial merupakan suatu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat sejahtera melalui penyediaan pelayanan sosial serta bantuan dalam bentuk materi atau bantuan keuangan. Dari kedua definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan sosial merupakan suatu bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

* 1. **Tujuan Kebijakan Sosial**

Berdasarkandefinisi dari kebijakan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan secara umum bahwa pada dasarnya kebijakan sosial bertujuan untuk dapat melayanin masyarakat dengan menggunakan pelayanan-pelayanan sosial, Lebih jelasnya dikemukakan oleh Suharto (2014: 111) bahwa tujuan dari kebijakan sosial adalah :

1. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural
4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.
5. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilann sosial.

 Berdasarkan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial memiliki tujuan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pelayanan-pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

* 1. **Ruang Lingkup Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial bukan hanya mengenai pelayanan-pelayanan sosial namun di dalam kebijakan sosial juga terdapat beberapa fokus ataupun metode yang dapat digunakan guna menunjang kebijakan sosial tersebut, Berdasarkan James Midgleym et,al, dalam *the handbook of social policy* (2000: 4) yang dikutip dalam Huda (2009: 89) bahwa kebijakan sosial mencakup dua aspek yaitu :

1. Pertama, program atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
2. Kedua, aspek wilayah akademik yang fokus kepada deskripsi, penjelasan dan evaluasi kebijakan.

Selain itu terdapat juga 3 metode yang telah dikenal umum yang dapat digunakan dalam kebijakan sosial untuk meningkakan kesejahteraan sosial, yaitu :

1. Program pelayanan sosial yang secara langsung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Metode ini paling umum digunakan karena mempunyai formula yang jelas untuk mengatasi masalah sosial.
2. Upaya utnuk menyejahterakan warga Negara dilakukan melalui produk perundang-undangan (*statutory regulation*).
3. Peningkatan kesejahteraan juga dapat dilakukan melalui sistem pajak. Pemgunaan sistm pajak ini dikenal degan istilah kesejahteraan fiscal. Di Indonesia dana pembangunan sosial juga ada yang berasal dari dana pajak misalnya untuk anggaran pendidikan.
	1. **Kategori dalam Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial dalam memberikan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat memiliki beberapa kategori yang berkaitan dengan garis besar kebijakan sosial. Menurut Midgley (2000) dalam Suharto (2008: 11) Dalam garis besar kebijakan sosial diwujudkam dalam 3 kategori, antara lain :

1. Peraturan dan perundang-undangan

Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan public yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.

1. Program pelayanan sosial

Sebagaian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, pendampingan).

1. Sistem perpajakan.

Dikenal sebagai kesejahteraan fiscal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrument kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil. Di Negara-negara maju, bantuan public (*public assistance*) dan asuransi sosial (*social insurance*) adalah dua bentuk jaminan sosial (*social security*) yang dana nya sebagian berasal dari pajak.

Berdasarkan kebijakan sosial yang telah dijelaskan, dalam penelitian ini kebijakan sosial yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung untuk dapat turut serta mengurangi angka kelahiran penduduk di Kota Bandung adalah kebijakan yang berupa bantuan publik yaitu berupa program pelayanan KB keliling yang diperuntukan bagi para akseptor KB sehingga dengan adanya program pelayanan KB keliling ini diharapkan dapat menekan angka kelahiran penduduk di Kota Bandung.

1. **Tinjauan tentang Keluarga Berencana**
	1. **Pengertian Keluarga Berencana**

Masalah keluarga berencana bukan merupakan masalah baru, tapi dapat disoroti oleh pengetahuan-pengetahuan baru dan data baru mengenai umat manusia dan dapat mempengaruhi sikap kita terhadap masalah lama. Dapat diutarakan bahwa keluarga berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa. Pengertian Keluarga Berencana menurut Koes Irwanto (2014 : 5) Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk.

 Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa Keluarga Berencana adalah suatu program yang diberlakukan oleh pemerintah guna menanggulangi masalah angka kelahiran tinggi yang ada di Indonesia, hal ini diberlakukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dengan jumlah penduduk dengan mengatur banyaknya jumlah kelahiran.

 Definisi lain tentang Keluarga Berencana yaitu menurut Masri Muadz (2010 : 10) yang menyatakan Keluarga Berencana adalah suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

 Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Keluarga Berencana merupakan suatu upaya peningkatan kepedulian dan juga peran serta masyarakat dengan melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga, hal ini adalah tidak lain untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia di setiap keluarga yang ada di Indonesia. Tentunya kepedulian dan partisipasi masyarakat ini sangat penting dan dibutuhkan sekali untuk kemajuan serta kesejahteraan keluarga dan untuk Indonesia tentunya.

* 1. **Tujuan Keluarga Berencana**

Tujuan Keluarga Berencana ialah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya suatu keluarga yang baik dengan cara mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

* 1. **Manfaat Keluarga Berencana**

Setiap tahun ada wanita meninggal akibat masalah yang melingkupi kehamilan, persalinan, dan pengguguran kandungan (aborsi) yang taka man. Keluarga berencana bisa mencegah sebagian besar kematian itu. Di masa kehamilan umpamanya, keluarga berencana dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat :

Kehamilan terlalu dini

Wanita yang belum hamil tatkala usianya belum mencapai 17 tahun sangat terancam oleh kematian sewaktu persalinan, hal ini dikarenakan tubuh belum sepenuhnya tumbuh, belum matang dan belum siap dilewati oleh bayi.

Wanita terlalu tua

Wanita yang usianya sudah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan terancam banyak bahaya. Khususnya bila ia mempunyai problema-problema kesehatan lain, atau sudah terlalu sering hamil dan melahirkan. Kehamilan-kehamilan terlalu berdasarkan jaraknya. Kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan kekuatan tubuh wanita. Kalau ia belum pulih dari satu persalinan tapi sudah hamil lagi, tubuh tak sempat memulihkan kebugaran, dan berbagai masalah bahkan juga bahaya kematian menghadang.

Terlalu sering hamil dan melahirkan

Wanita yang sudah punya lebih dari 4 anak dihadang bahaya kematian, akibat pendarahan hebat dan macam-macam kelainan lain, bila ia terus saja hamil dan bersalin lagi.

1. **Tinjauan tentang Intervensi Pekerjaan Sosial**
	1. **Pengertian Pekerjaan Sosial**

Kesejahteraan sosial pada dasarnya memiliki tujuan utama yang dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami yakni berfokus untuk dapat mengembalikan keadaan keberfungsian sosial pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Namun, untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentunya sangatlah dibutuhkan bantuan dari tenaga professional yang dapat turut serta membantu dalam mewujudkan kondisi keberfungsian sosial tersebut. Tenaga professional yang dapat membantu menangani dan mewujudkan hal tersebut adalah seorang pekerja sosial. Menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2009: 1) Pekerjaan sosial adalah:

Aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas professional untuk dapat menolong seseorang atau individu, kelompok hingga masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar dapat berfungsi sosial serta menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

* 1. **Tujuan Intervensi Pekerjaan Sosial**

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwa pengertian Pekerjaan sosial secara garis besar adalah bertujuan untuk dapat memberikan bantuan dalam menangani permasalahan sosial yang ada serta membantu mengembalikan keberfungsian sosial yang terganggu menjadi kembali lagi seperti sedia kala. Menurut *The National Association Of Social Workers* (NASW) dalam Huda (2009: 15) awalnya pekerja sosial mempunyai 4 tujuan utama, namun belakangan *The Council On Social Work Education* menambah 2 tujuan pekerjaan sosial sehingga menjadi 6, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya.
2. Menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif.
4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak.
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi.
6. Mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan professional.

Berdasarkan dari tujuan pekerjaan sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pekerjaan sosial adalah meningkatkan suatu kapasitas masyarakat agar dapat menyelesaikan masalahnya, serta dapat menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan suatu fungsi sosialnya. Untuk dapat mensukseskan peranan tujuan pekerjaan sosial ini tentunya dengan cara melakukan hal yang disini berarti memperbaiki atau mengembalikan keberfungsian sosial yang ada pada individu, kelompok maupun masyarakat. Karena dengan begitu semua permasalahan sosial yang ada tentunya akan terselesaikan juga. Dalam hal ini kebijakan pemerintah khusunya kota Bandung yang kemudian memberikan mandat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang lalu memberikan pelayanan KB keliling untuk masyarakat dan akseptor kb tentunya.

Hal ini dilakukan guna menekan angka laju pertumbuhan penduduk khususnya di kota Bandung, dan masalah sosial yang ada yaitu membeludaknya penduduk dapat diatasi dan juga terselesaikan. Dengan banyaknya akseptor kb atau masyarakat yang berpartisipasi dalam pelayanan kb keliling ini, maka dengan sendirinya masyarakat atau akseptor kb akan ikut untuk memajukan kehidupan keluarga dan juga Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa peran pekerja sosial sebagai profesi yang dalam hal ini adalah ikut serta meningkatkan kinerja lembaga-lembaga yang dalam cakupan ini adalah Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanannya agar dapat berjalan secara efektif serta sesuai dengan rencana dan kebijakannya.

* 1. **Fokus Intervensi Pekerja Sosial**

Pekerja sosial merupakan suatu profesi bertujuan untuk dapat mencegah dan mengatasi suatu permasalahan sosial dan agar dapat mengembalikan keberfungsian sosial yang terganggu dari suatu permasalahan sosial yang ada. Selain memiliki tujuan, pekerja sosial juga memiliki fokus intervensi dalam memberikan pertolongannya. Menurut Iskandar dalam Suharto (2009: 5) Fokus intervensi pekerja sosial adalah:

Fokus intervensi pekerja sosial yang berhubungan dengan kemampuan pekerja sosial untuk memusatkan perhatiannya, baik terhadap usaha klien melihat aspek penting dari situasi tersebut, maupun memegang teguh beberapa kesimpulan dari fokus tersebut atau kemajuan yang telah dicapai. Hal ini berarti bahwa pekerja sosial harus dapat memahami satu aspek masalah atau alternatif pemecahannya.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa fokus intervensi pekerjaan sosial adalah suatu kemampuan pekerja sosial untuk memusatkan perhatiannya terhadap klien dan melihat aspek-aspek penting dalam situasi tersebut. Dan juga memegang teguh beberapa kesimpulan dari fokus tersebut atau kemajuan yang telah dicapai. Dalam hal ini berarti bahwa pekerja sosial ini harus dapat memahami satu aspek masalah atau alternatif pemecahannya.

 Intervensi yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam persepsi akseptor kb tentang pelayanan tim keluarga berencana keliling ini adalah ikut serta membantu pemerintah yang telah membuat kebijakan tentang kb keliling ini dengan melakukan pengorganisasian dan pengembangan pelayanan terhadap pelayanan program tim keluarga berencana sehingga diharapkan partisipasi dari akseptor kb akan semakin tinggi agar dapat mengikuti serta turut berpartisipasi dalam pelayanan kb keliling. Dengan tingginya partisipasi akseptor kb ini diharapkan agar dapat membantu menanggulangi atau mencegah terjadinya ledakan penduduk khususnya di kota bandung agar dapat terkontrol perkembangan angka kelahirannya, sehingga dengan begitu maka keluarga yang ada di kota bandung akan sejahtera.

* 1. **Metode Intervensi Pekerjaan Sosial**

 Setiap penanganan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial tentunya menggunakan pengetahuan-pengetahuan dan ilmu yang telah dimiliki dan juga secara professional dalam setiap penanganannya. Bidang garap pekerjaan sosial mencakup masalah sosial yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Tentunya dalam hal ini seorang pekerja sosial juga harus dapat menepatkan dirinya karena dalam setiap penanganan yang diberikan baik kepada individu, kelompok, ataupun masyarakat tentunya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Huda (2009: 18) Atas cangkupannya yang berbeda ini pekerjaan sosial terbagi pada 3 level, yaitu :

1. Mikro (individu)

Pada level mikro ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan casework (terapi perseorangan/terapi klinis)

1. Mezzo (keluarga dan kelompok kecil)

Pada level mezzo ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan group work (terapi kelompok) dan family therapy (terapi keluaraga)

1. Makro (organisasi atau masyarakat)

Pada level makro ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan community development (pengembangan masyarakat) atau policy analysis (analisis kebijakan)

Berdasarkan metode intervensi pekerja sosial tersebut maka dalam hal ini pekerja sosial menggunakan level mezzo karena pada kebijakan Pelayanan Program Tim Keluarga Berenana Keliling memiliki subjek yaitu para akseptor KB yang diharapkan untuk dapat berpartisipasi dan berikutserta dalam memanfaatkan pelayanan KB keliling. Dengan adanya pelayanan KB keliling ini, dapat diharapkan para akseptor KB berpartisipasi dengan baik dalam pelayanan ini. Tujuan utama pekerja sosial dalam strategi mezzo ini yaitu memberikan motivasi-motivasi dan juga informasi kepada para akseptor KB betapa pentingnya mengikuti KB untuk dapat berperan aktif dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Bandung khususnya Kecamatan Regol yang tentunya juga bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan sosial yang berupa pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Bandung, selaitu pekerja sosial juga menjadi penghubung antara pihak akseptor KB dan juga pemerintah mengenai Pelayanan Program KB Keliling sehingga diharapkan pekerja sosial dapat menjadi penghubung yang dapat turut serta memberikan masukan agar Pelayanan KB Keliling di Kota Bandung ini dapat menjadi semakin lebih baik dan juga bermanfaat bagi akseptor KB dan masyarakat lainnya.

* 1. **Model Pertolongan Pekerjaan Sosial**

Selain strategi dan metode pekerjaan sosial yang sangatlah penting untuk dapat membantu menyelesaikan suatu permasalahan sosial, model pertolongan yang digunakan juga sangatlah penting secara paradigmatic model pertolongan pekerjaan sosial sangat tergantung atau dipengaruhi oleh beroperasinya 5c, yang merupakan kepanjangan dari concept, commitment, capability, connection, dan communication dalam proses dan praktik pekerjaan sosial. Menurut Suharto (2014: 30) untuk lebih jelasnya 5c dijelaskan secara rinci, yaitu :

1. *Concept*

Menunjuk pada perumusan konsep-konsep pekerjaan sosial yang akan dijadikan *focus of inquiry* secara ringkas, menarik dan jelas.

1. *Commitment*

 Penerimaan secara konsisten terhadap konsep yang telah didefinisikan dan akan digunakan sebagai pisau analisi.

1. *Capability*

 Kemampuan atau keahlian dalam mengaplikasikan konsep.

1. *Connection*

Koneksi atau jaringan dengan mana praktik pekerjaan sosial beroperasim baik dengan teman sejawat dalam bingkai asosiasi profesi lain secara teamwork.

1. *Communication*

Mengkomunikasikan setiap hasil praktik dalam bentuk jurnal, buku. Bagi masyarakat modern, publikasi tertulis merupakan dinamika sentral dan pendefinisi kemajuan peradaban.

* 1. **Nilai dan Kode Etik dalam Pekerjaan Sosial**

Dalam setiap profesi tentunya memiliki kode etik dan juga nilai-nilai yang ada. Hal tersebut tentulah sangat diperlukan agar suatu profesi tidak keluar dari garis-garis yang telah ditentukan dan juga tetap pada koridor yang seharusnya. Hal tersebut tidaklah terkecuali pada profesi pekerjaan sosial, menurut Reamer (1999: 26) dalam Huda (2009: 143) Secara umum bentuk nilai yang dapat dinukilkan dari kode etik NASW (*National Association Of Social Worker*) antara lain :

1. Pelayanan

Prinsip etiknya adalah pekerja sosial harus mengutamakan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memusatkan pada permasalahan sosial.

1. Keadilan sosial

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial wajib untuk menentang ketidakadilan sosial. Ujuan inti pekerjaan sosial adalah menuju perubahan sosial yang lebih humanis dan mengarah kepada kesejahteraan sosial.

1. Harkat dan martabat seseorang

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial menghormati harkat dan martabat seseorang.

1. Mementingkan hubungan kemanusiaan

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial mengakui dan mengutamakan hubungan kemanusiaan.

1. Integritas

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial harus mempunyai perilaku yang dapat dipercaya.

1. Kompetensi

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial harus mempraktikkan keahlian profesionalismenya dalam proses pertolongan yang dilakukan.